



Media: Republika

Hari: Jumat

Tanggal: 20 Maret 2015

Halaman: 18

Pemkot Bisa Batasi Alih Fungsi Sawah

Pemkot masih harus mengkaji aturan pembatasan tersebut.

YOGYAKARTA — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X sempat menyatakan kekhawatirannya terkait alih fungsi lahan. Sultan prihatin kondisi tersebut menyebabkan berkurangnya lahan pertanian di DIY.

Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ini juga mendapat sorotan Wakil Wali Kota Yogyakarta Imam Priyono. Ia mewacanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dapat mengeluarkan aturan pembatasan alih fungsi lahan pertanian. Sehingga, sawah tidak banyak yang berubah menjadi kawasan permukiman ataupun lainnya. "Jika aturan itu memang diperlukan, maka pemerintah akan mewacanakan untuk membuat aturan terkait pembatasan alih fungsi lahan pertanian agar tidak berubah fungsi menjadi bentuk lain," kata Imam di Yogyakarta, Kamis (19/3).

Imam mengatakan, ketentuan pembatasan tersebut bisa berupa peraturan wali kota. Namun, untuk membuat aturan tersebut, kata dia, pemkot masih harus melakukan kajian. "Akan kami kaji dulu bagaimana kemungkinannya," ujar dia.

Lahan pertanian di Kota Yogyakarta, menurut Imam, tidak hanya dimiliki perorangan. Tetapi, kata dia, ada juga lahan yang merupakan milik pemkot, seperti di Kelurahan Bener. Sejauh ini, ia menilai lahan pertanian di wilayahnya mampu menghasilkan berbagai produk, seperti padi dan palawija. Menurut dia, hasil produksi itu turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Imam mencontohkan hasil padi di Kelurahan Rejo-winangun, Kecamatan Kotagede, Yogyakarta. Bahkan, ia menilai hasil pertanian di wilayah tersebut mempunyai kualitas terbaik. "Meskipun luas lahan pertanian di Kota Yogyakarta terbatas, namun kami berharap pertanian di kota bisa menjadi percontohan untuk daerah lain," ujar dia.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta Suyana, luas lahan pertanian di Kota Yogyakarta mencapai

64 hektare dan 14 hektare di antaranya sudah panen padi. Ia mengatakan, tidak semua lahan pertanian itu menggunakan irigasi. Tetapi, kata dia, ada juga lahan pertanian tadah hujan, sehingga petani hanya bisa menanam satu kali setahun. Menurut dia, rata-rata hasil panen padi dari tiap hektare lahan adalah 6,3 ton gabah kering giling. "Hasil tersebut sudah cukup tinggi," kata dia.

Sementara itu di Kabupaten Sleman, DIY, Bupati Sleman Sri Purnomo mengaku optimistis bisa mewujudkan swasembada padi. Kamis, bupati ikut menghadiri panen raya padi Kelompok Tani Sedyo Maju Karangon, Jogotirto, Berbah. Panen berlangsung di sawah seluas 45 hektare dengan jenis padi inpari 10. Ketua Kelompok Tani Sedyo Maju, Siswanto, mengatakan, para petani terbantu dengan adanya teknologi dalam penanaman.

Setidaknya ada tiga macam sistem penanaman, yaitu Tabela (Tanam Bemih Langsung), AWD (Alternate Wetting and Drying) atau pengaliran basah-kering untuk menghemat air serta sistem, dan Trijirwo (Tanam Jajar Legowo). "Kehanyakan anggota kelompok meminati sistem Tabela. Dalam satu ubin diperoleh hasil delapan hingga 10 ton gabah kering," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Sri mengapresiasi usaha para petani. Ia juga berterimakasih akan upaya pendampingan dan pelatihan dari berbagai pihak, sehingga mampu meningkatkan hasil panen petani. Bupati mengharapkan ke depannya hasil panen di wilayahnya akan semakin meningkat dan bisa mencapai swasembada padi.

Iren Kementerian Pertanian Aziz Hidayat, yang turut hadir dalam acara panen raya, mengatakan, luas lahan penanaman padi di DIY sudah mencapai 96.672 hektare. "Hal ini tentunya merupakan prestasi tersendiri bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang jelas harus dipertahankan," katanya. Untuk pengembangan pertanian, kata dia, pemerintah pusat total mengalokasikan sekitar Rp 70 triliun. Anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan.

■ antaraj/c97 ed: rian fitrat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005